



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN  
ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE**

**YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang angkutan kota antara provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. 6736/ AJ.205/ DRJD/ 2014 tentang tarif jarak batas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Organda Kabupaten Bone pada hari kamis tanggal 20 November 2014 di kantor Dinas perhubungan Kabupaten Bone terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Bone tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. ORGANDA adalah Organisasi Angkutan Darat.

### **BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG**

#### **Pasal 2**

Besaran tarif penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dengan batas maksimal 20% dari tarif yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur jalan, jarak tempuh dan daya jangkauan masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- a. Setiap pengusaha jasa angkutan wajib mengikutsertakan penumpang, sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang.
- b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam dikenakan 50% dari tarif

### BAB III

#### PELAYANAN JASA ANGKUTAN

##### Pasal 4

Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi : keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kenaikan Operasional Kendaraan di Jalan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

Dinas Perhubungan, ORGANDA dan KOANGDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa angkutan.

### BAB V

#### PENUTUP

##### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada Tanggal, 28 November 2014



**BUPATI BONE,**

*[Handwritten Signature]*  
**A. FASHAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada Tanggal, 28 November 2014



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

*[Handwritten Signature]*  
**A. SURYA DARMA**

**TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BONE**

NO	NAMA JURUSAN/ TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF LAMA (Rp.)	TARIF BARU (Rp.)
<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>				
<b><u>BONE UTARA</u></b>				
1.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TOKASENG	17	8.500	10.000
2.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAMURUKUNG	21	11.000	13.000
3.	TERM. PETTA PONGGAWAE-ULOE	31	15.000	18.000
4.	TERM. PETTA PONGGAWAE- SAILONG	45	21.000	25.000
5.	TERM. PETTA PONGGAWAE-CENRANA	41	20.000	24.000
6.	TERM. PETTA PONGGAWAE-POMPANUA	47	25.000	30.000
<b><u>BONE BARAT</u></b>				
7.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PASEMPE	20	9.000	10.500
8.	TERM. PETTA PONGGAWAE- GALUNG	24	9.000	10.500
9.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TARETTA	43	14.500	17.000
10.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KOPPE	33	17.000	20.000
11.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BENGU	43	18.500	22.000
12.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAPRI	55	20.000	24.000
13.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PARIGI	60	25.000	30.000
14.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAMURU	67	29.000	34.000
15.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TANA BATUE	67	30.000	36.000
16.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CAMMING VIA MATANGO	70	20.000	24.000
17.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TOBENTENG	50	20.000	24.000
<b><u>BONE SELATAN</u></b>				
18.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TANETE (CINA)	17	10.000	12.000
19.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LONRONG	30	17.000	20.000
20.	TERM. PETTA PONGGAWAE- ARASOE	25	15.000	18.000
21.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KAJU	28	14.000	16.800
22.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CAPPA UJUNG	27	20.000	24.000
23.	TERM. PETTA PONGGAWAE- MARE	35	14.000	16.800
24.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TONRA	48	20.000	24.000
24.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KAJUARA	70	35.000	42.000
26.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PALATTAE	90	35.000	42.000
27.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BONTOCANI	105	40.000	48.000
28.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PATIMPENG	95	35.000	42.000
29.	TERM. PETTA PONGGAWAE- SALOMEKKO	60	25.000	30.000
<b><u>ANGKUTAN KOTA</u></b>				
30.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BAJOE	7	6.000	7.000
31.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PALETTE	12	10.000	12.000
32.	TERM. PETTA PONGGAWAE- MALLARI	12	7.000	8.400
33.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PATTIRO BAJO	15	15.000	18.000
34.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PACCING/ UNRA	15	6.000	7.000
35.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAPECCANG	15	7.000	8.400
36.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KADING	12	7.500	9.000
37.	TERM. PETTA PONGGAWAE- WOLLANGI	12	5.000	6.000
38.	PS. SENTRAL WTP – TERM. PT. PONGGAWAE – PANYILI-LAMPOKO	15	5.500	6.600
39.	PS. SENTRAL WTP-TERM.PT.PONGGAWAE- TACCIPI	15	10.000	12.000
40.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CUMPIGA	14	12.000	14.000
41.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PS. SENTRAL WTP/BTC	4	3.500	4.200
42.	TERM. PETTA PONGGAWAE- ANGKUTAN DALAM KOTA	5	3.500	4.200

Watampone, 28 November 2014



BUPATI BONE,

A. FASHAR M. PADJALANGI